

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan amanat atau memberikan wewenang kepada *agent* yang disebut investor untuk melakukan suatu jasa. *Agent* adalah yang diberi mandat atau pihak yang menerima wewenang yang disebut manajer. Teori agensi mendasarkan kontrak hubungan antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Konflik keagenan terjadi ketika pemegang saham tidak mampu memastikan apakah manajer bertindak untuk kepentingan mereka. Pihak manajer setiap hari berinteraksi langsung dengan kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi dalam perusahaan. Dengan demikian, pihak manajer mempunyai informasi yang sangat lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya. Sementara itu, pemegang saham hanya memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer.

Konflik asimetri informasi dapat diminimalisir dengan cara melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai wujud transparansi dari aktivitas manajemen kepada pemilik. Pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab dari manajemen sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Bentuk pelaporan dan pengungkapan modal intelektual atau *intellectual capital disclosure* (ICD) merupakan satu wujud tanggung jawab manajemen atas prinsip transparansi dalam *good corporate governance* (GCG) (Ariva Puasanti, 2013).

2.1.2. Modal intelektual

Modal intelektual (*intellectual capital*) adalah suatu pengetahuan, informasi dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal (Ahmadi Nugroho, 2012:2).

Modal intelektual berasal dari pengetahuan atau *knowledge*, dan kearifan atau *wisdom* dalam mencapai tujuan. Modal intelektual ini berakar dari kemampuan untuk bersikap kritis, kreatif dan inovasi dalam menghadapi berbagai masalah (*critical, and ceartitive thinking dan innovative minds*). Kemampuan intelektual ini senantiasa menghasilkan gagasan segar dan baru untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Berkaitan dengan investasi, modal intelektual ini tergambar dalam kemampuan pengelolaan sumber daya investasi dengan efisiensi dan efektif (Henry Faizal Noor, 2009:75).

Dalam PSAK Nomor 19 tahun 2009 tentang aset tak berwujud, telah disebutkan bahwa modal intelektual merupakan kategori *intangible asset*. Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual atau *intellectual capital* masih bersifat sukarela, mengingat PSAK Nomor 19 belum mengatur tentang modal intelektual baik dari cara pengidentifikasiannya maupun dari segi pengukurannya. Sedangkan kriteria untuk memenuhi definisi *intangible assets* antara lain dapat diidentifikasi, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis masa depan (Ariva Puasanti, 2013).

Sampai saat ini belum adanya definisi tunggal dari modal intelektual yang masih menjadi perdebatan para pakar. Modal intelektual seringkali dianggap sebagai nilai misterius (*mysterious value*) yang terletak di antara nilai buku (*book value*) dan nilai pasar perusahaan (Bambang Purnomosidhi, 2006). Hal ini terjadi karena belum ada standar akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang modal intelektual dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Tjiptohadi Sawarjuwono dan Agustine Prihatin Kadir (2003), modal intelektual dapat dikelompokkan ke dalam tiga komponen yaitu :

1. Modal manusia (*Human Capital*)

Modal manusia merupakan bagian terpenting dalam modal intelektual. Modal manusia juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Modal manusia akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

2. Modal organisasi (*Structural Capital* atau *Organizational Capital*)

Modal organisasi merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses *manufacturing*, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka *intellectual capital* tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. Modal pelanggan (*Relational Capital* atau *Customer Capital*)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Modal pelanggan merupakan hubungan yang harmonis (*association network*) yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Modal organisasi dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

2.1.3. Pengungkapan Modal Intelektual

Modal intelektual sekarang ini dianggap sebagai faktor kesuksesan bagi suatu organisasi dan karenanya akan semakin menjadi perhatian dalam kajian strategi organisasi dan strategi pembangunan. Adapun alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual adalah untuk meningkatkan manajemen perusahaan, untuk meningkatkan pelaporan eksternal dan untuk memenuhi faktor perundang-undangan dan transaksi. Dengan mengungkapkan informasi intelektual, perusahaan dapat memberikan informasi tentang nilai - nilai yang diterapkan dalam perusahaan serta kinerja perusahaan dalam menciptakan kekayaan sehingga reputasi perusahaan dapat meningkat. Peningkatan nilai relevansi laporan keuangan dapat mencegah perusahaan pada kondisi sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam menyampaikan informasi secara relevan sehingga mengakibatkan kemerosotan posisi keuangan perusahaan dan dapat menghilangkan daya saing jangka panjang.
2. Investor sulit menilai secara akurat nilai perusahaan untuk alokasi sumber daya dengan menggunakan laporan keuangan yang tidak melaporkan modal intelektual.
3. Manajer sulit untuk menentukan relevansi aset tidak berwujud yang diperlukan untuk operasi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan index pengungkapan yang dikembangkan oleh Bukh, et al (2005) yang terdiri dari 78 item yang dibagi ke dalam 6 (enam) bagian, yaitu karyawan (27 item), pelanggan (14 item), teknologi informasi (5 item), proses (8 item), R&D (9 item) dan statement strategis (15 item), dengan rumus :

$$\text{Score} = \frac{\sum di}{M} \times 100 \%$$

(Ahmadi Nugroho, 2012:2)

Keterangan :

Score = index pengungkapan modal intelektual (ICD Index)

di = jumlah intellectual capital disclosure yang diungkapkan perusahaan

Ketentuan : 1 jika diungkapkan dalam laporan tahunan

0 jika tidak diungkapkan dalam laporan tahunan

M = total jumlah item yang diukur (78 item)

2.1.4. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ini berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut World Bank adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah - kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong kinerja sumber - sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing - masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent lawenforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Menurut Komite Nasional kebijakan Governance, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang memadai. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG,

perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adanya penerapan GCG menjadikan cara kerja perusahaan menjadi tersistem yang memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, ukuran komite audit.

2.1.4.1. Proporsi Komisaris Independen

Menurut Pedoman Komisaris Independen, Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam Peraturan Pencatatan Efek No. 1 – A PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia Indonesia) butir 1 mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat ekuitas di Bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Butir 2 dari peraturan tersebut mengatur mengenai persyaratan komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa komisaris independen dilarang untuk memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya, dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen mewakili kepentingan minoritas, sehingga diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik. Dalam kaitannya dengan implementasi GCG dip perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, peranan komisaris independen sangatlah penting (Muh. Arief Effendi, 2009:16).

Proporsi komisaris independen dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100 \%$$

(Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto, 2013: 6)

2.1.4.2. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan merupakan sejumlah saham yang beredar yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan terjadi karena adanya dominasi atas kepemilikan saham perusahaan oleh struktur kepemilikan tertentu, yaitu dapat berupa struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional atau struktur kepemilikan asing.

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Menurut teori keagenan, konflik keagenan yang lebih tinggi berpotensi timbul ketika konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan rendah. Pengungkapan modal intelektual secara lebih luas dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah keagenan tersebut. Melalui pengungkapan modal intelektual secara lebih luas, pemegang saham memiliki pandangan yang lebih baik terhadap kondisi perusahaan. Dengan demikian, asimetri informasi antara

pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pada akhirnya, dengan berkurangnya asimetri informasi, maka biaya keagenan yang dikeluarkan untuk memantau kinerja manajer juga berkurang. Oleh karena itu, semakin tinggi konsentrasi kepemilikan maka perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi tentang modal intelektual sebagai salah satu tanggung jawab perusahaan (*agent*) terhadap pemegang saham (*principal*). Konsentrasi kepemilikan dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

(Heni Octavianti dan Wahidahwati, 2014:10)

2.1.4.3. Ukuran Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan – perusahaan.

Pengakuan mengenai perlunya komite audit dapat dianggap sebagai persyaratan pasar (*required by the market*) bukan suatu keharusan hukum. Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem perekonomian pasar. Hal-hal yang patut dan harus dilaporkan kepada komite audit, seperti kelemahan dalam pengendalian internal, perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu, dan hambatan dalam melakukan audit.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang *good corporate governance* pasal 12 ayat 1. Dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk paling tidak komite audit, komite pemantau resiko, serta komite remunerasi dan nominasi. Sementara, pasal 38 dari peraturan itu

menyebutkan bahwa struktur keanggotaan komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang diantaranya :

1. Seorang komisaris independen (yang sekaligus menjabat sebagai ketua);
2. Seorang yang berasal dari pihak independen dan memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
3. Seseorang yang berasal dari pihak eksternal dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Ukuran komite audit dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Ukuran Komite audit} = \text{Jumlah anggota dalam komite audit}$$

(Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto, 2013:6)

2.1.5. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). Perbedaan karakteristik antar perusahaan akan membuat perusahaan tersebut memiliki nilai tersendiri dimata masyarakat dan perbedaan tersebut menyebabkan pengungkapan informasi pada setiap perusahaan berbeda. Karakteristik perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

2.1.5.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar atau kecil suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka tuntutan akan keterbukaan informasi juga akan semakin tinggi apabila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Fitri Romadhon dan Isnalita, 2014). Perusahaan yang berskala besar memiliki aktivitas yang lebih banyak dan hubungan yang lebih kompleks. Perusahaan yang berskala besar juga lebih terlihat dan diawasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Sehingga hal yang rasional jika perusahaan berskala besar lebih mampu mengungkapkan modal intelektual untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memenuhi harapan masyarakat serta untuk mematuhi norma yang berlaku (Suci Yuli Priyanti dan Agus Wahyudin, 2015).

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai variabel independen dengan asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar mampu melaksanakan aktivitas yang lebih banyak dan sumber daya yang dimiliki berpotensi untuk menciptakan nilai jangka panjang. Perusahaan yang lebih besar akan mendapatkan pengawasan yang lebih intensif oleh *stakeholder*, untuk mengetahui cara manajemen dalam mengelola *intellectual capital* yang dimiliki, seperti pegawai, pelanggan, dan organisasi pekerja (Bambang Purnomosidhi, 2006). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan :

$$\text{SIZE} = \ln (\text{Total Aktiva})$$

(Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto, 2013:6)

2.1.5.2. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Semakin lama umur perusahaan semakin terlihat pula eksistensi perusahaan (*going concern*), sehingga semakin luas pula pengungkapan yang dilakukan yang berkaitan untuk menciptakan keyakinan pada pihak luar dalam kualitas perusahaannya (Ahmadi Nugroho, 2012). Perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak atau menyeluruh termasuk modal intelektual untuk memenuhi harapan dan keinginan lingkungan di mana perusahaan tersebut berdiri terkait dengan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Suci Yuli Priyanti dan Agus Wahyudin, 2015). Umur perusahaan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Age} = \text{tahun penelitian} - \text{tahun awal pendirian}$$

(Akin Septiawan Pernomo, 2012: 47)

2.1.6. Kinerja Perusahaan

Laporan keuangan (*financial statement*) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor, dan agen regulator. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan suatu entitas dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjelaskan mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan .

Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan keyakinan kepada investor akan keadaan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan respon yang positif dari pasar. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah profitabilitas dan *leverage*.

2.1.6.1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Perusahaan umumnya mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang optimal. Namun, dengan laba yang optimal belum merupakan ukuran bagi perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Efisiensi suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan laba usaha perusahaan tersebut yaitu dengan menghitung profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. ROA juga merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA. 2015:193).

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar (I Made Sudana, 2011:22). ROA dapat diukur dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

(Hery, 2015:193)

2.1.6.2. *Leverage*

Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. *Leverage* menggambarkan kondisi struktur modal perusahaan untuk melihat potensi risiko dari tak tertagihnya suatu hutang. *Leverage* digunakan perusahaan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaannya. Terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan-perusahaan yang tingkat ketergantungannya kepada utang sangat tinggi sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency costs*) yang tinggi (Bambang Purnomosidhi, 2006). Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela, termasuk informasi yang berkaitan dengan modal intelektual. Pengungkapan sukarela dapat diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat *leverage*. Melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak, perusahaan dapat menyakinkan pengguna, terutama untuk pihak kreditur, bahwa nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan kinerja keuangan tapi juga karena faktor lain, meliputi *intellectual capital*. *Leverage* dapat diukur dengan rumus :

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

(I Made Sudana, 2011)

2.2. Review Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual telah banyak dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda. Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian yang menggunakan pengungkapan modal intelektual sebagai variabel penelitian, antara lain:

1. Akin Septiawan Pernomo (2011)

Akin Septiawan Pernomo melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual (Studi Empiris Pada Perusahaan Keuangan Yang Listing di BEI)”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 69 perusahaan dengan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sejumlah 58

perusahaan. Periode pengamatan pada yang diteliti adalah tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, *leverage* dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela modal intelektual. Sedangkan secara parsial hanya ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela modal intelektual.

2. Ahmadi Nugroho (2012)

Ahmadi Nugroho melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi *Intellectual Capital Disclosure*”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yang diperoleh sampel sejumlah 68 perusahaan. Periode pengamatan pada yang diteliti adalah tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan *leverage* tidak berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

3. Henggar Malika Purna Cahya (2013)

Henggar Malika Purna Cahya melakukan penelitian dengan judul “Determinasi Luas Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perbankan”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yang diperoleh sampel sejumlah 75 perusahaan. Periode pengamatan pada yang diteliti adalah tahun 2009 - 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kinerja modal intelektual, tingkat hutang, konsentrasi kepemilikan, dan umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Sedangkan secara parsial, variabel ukuran dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, komite audit dan umur listing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan modal intelektual.

4. Heni Octavianti dan Wahidahwati (2014)

Heni Octavianti dan Wahidahwati melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Intellectual Capital”. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yang diperoleh sampel sejumlah 122 perusahaan. Periode pengamatan pada yang diteliti adalah tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, tingkat profitabilitas, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap *intellectual capital*. Sedangkan secara parsial, ukuran perusahaan, umur perusahaan, tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Berdasarkan uraian diatas, review penelitian terdahulu dapat diringkas dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Nama peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang Diperoleh
Akin Septiawan Pernomo (2011)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Empiris Pada Perusahaan Keuangan Yang Listing di BEI)	<u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan Modal Intelektual <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. Konsentrasi Kepemilikan, d. <i>Leverage</i> , e. Komisaris Independen	a. Secara simultan, ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, <i>leverage</i> dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela modal intelektual. b. Secara parsial, hanya ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela modal intelektual.

Nama peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Ahmadi Nugroho (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	<u>Variabel dependen:</u> <i>Intellectual Capital Disclosure</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. Komisaris Independen d. Konsentrasi e. Kepemilikan f. <i>Leverage</i>	<u>Secara simultan</u> , variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ICD <u>Secara parsial</u> , variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ICD
Henggar Malika Purna Cahya (2013)	Determinasi Luas Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perbankan	<u>Variabel Dependen :</u> Luas Pengungkapan Modal Intelektual <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran dewan komisaris, b. Jumlah rapat dewan komisaris c. Ukuran Komite audit d. Tingkat utang e. Konsentrasi Kepemilikan <u>Variabel Pengendali :</u> Umur <i>Listing</i> <u>Variabel Dependen:</u>	a. <u>Secara simultan</u> , ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kinerja modal intelektual, tingkat hutang, konsentrasi kepemilikan, dan umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. b. <u>Secara parsial</u> , variabel ukuran dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, komite audit dan umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual.
Heni Octavianti, Wahidahwati (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>	Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> <u>Variabel Independen</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. <i>Leverage</i>	a. <u>Secara simultan</u> , ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i> , tingkat profitabilitas, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap <i>intellectual capital</i> .

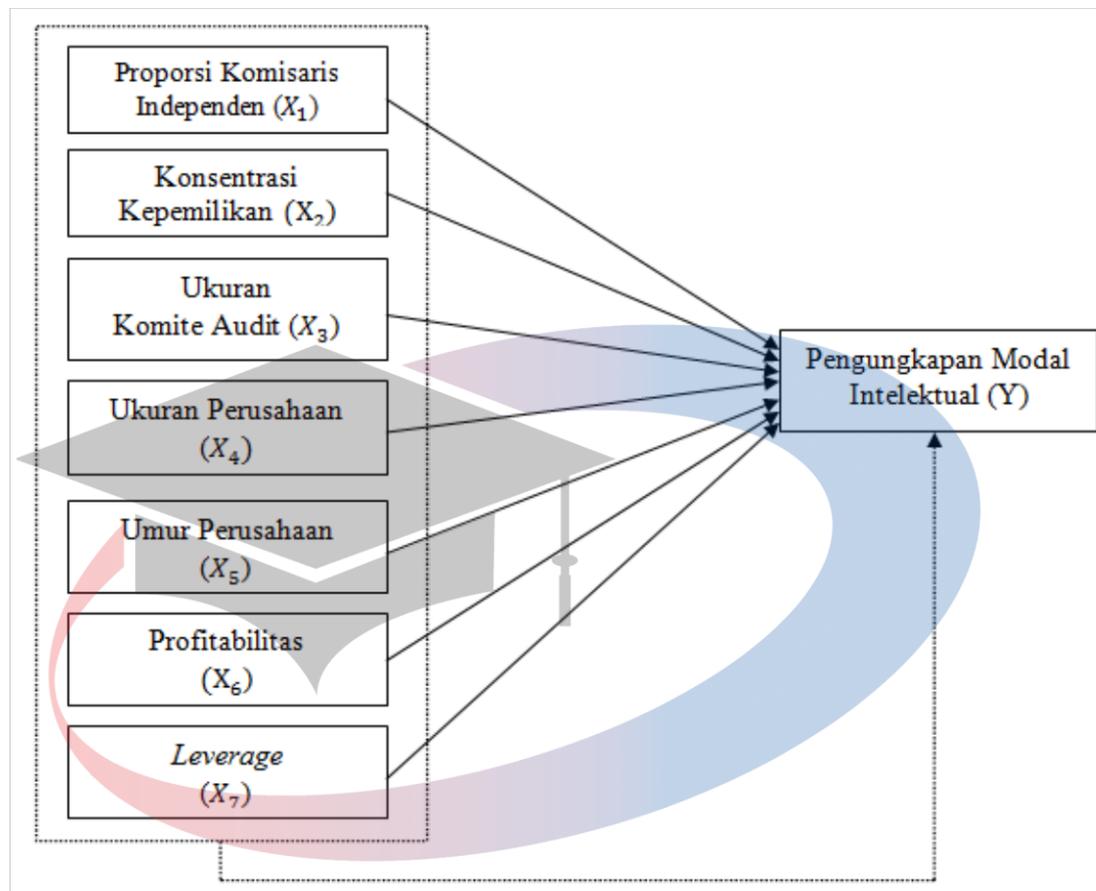
Nama peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil yang diperoleh
		d. Tingkat Profitabilitas e. Komisaris Independen f. Konsentrasi Kepemilikan	b. Secara parsial, ukuran perusahaan, umur perusahaan, tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> .

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu gambaran ringkas mengenai pengaruh atau hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual dimana variabel independennya adalah proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Sedangkan, variabel dependennya adalah pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Variabel Independen : Variabel Dependen:



Keterangan : - - - - = simultan

———— = parsial

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam perusahaan diharapkan mampu menjembatani adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak manajer. Sebagai pihak yang netral, komisaris independen mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas perusahaan dan mengendalikan perilaku para manajer perusahaan (Akin Septiawan Pernomo, 2011: 8). Semakin besar jumlah dewan komisaris independen terhadap total anggota komisaris yang ada

di perusahaan, maka aktivitas pengawasan pelaksanaan prinsip tata kelola yang berupa transparansi informasi akan berjalan lebih efektif, sehingga manajemen akan lebih terdorong untuk meningkatkan luas pengungkapan sukarela

Menurut penelitian Henggar Malika Purnama Cahya (2013), variabel komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris independen, maka tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris independen yang sedikit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.2. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Pengungkapan modal intelektual secara lebih luas dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah keagenan. Melalui pengungkapan modal intelektual secara lebih luas, pemegang saham memiliki pandangan yang lebih baik terhadap kondisi perusahaan. Dengan demikian, asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pada akhirnya, dengan berkurangnya asimetri informasi, maka biaya keagenan yang dikeluarkan untuk memantau kinerja manajer juga berkurang. Dengan adanya peran dan kuasa oleh kepemilikan saham yang terkonsentrasi memberi pengaruh terhadap aktivitas operasi perusahaan, salah satunya tekanan terhadap manajer untuk melakukan pengungkapan modal intelektual.

Menurut penelitian Ariva Puasanti (2013), variabel konsentrasi kepemilikan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Dapat disimpulkan bahwa semakin terkonsentrasi suatu kepemilikan diharapkan dapat mendorong perusahaan dalam pengungkapan modal intelektual yang dapat mengurangi konflik agensi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H_2 : Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Komite audit berperan sebagai alat pengendali dalam mekanisme *corporate governance* yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan (Dista Amalia Arifah, 2012 :194).

Menurut penelitian Hengger Malika Purna Cahya (2013), komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian, semakin besar ukuran komite audit suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan, seperti informasi modal intelektual semakin luas dan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Semakin besar perusahaan semakin besar perhatian atau sorotan stakeholder. Oleh karena itu perusahaan akan semakin banyak melaporkan informasi *intellectual capital disclosure* (ICD) (Djoko Suhardjanto dan Mari Wardhani, 2010;76). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan teori agensi (*agency theory*) yang menyatakan bahwa biaya keagenan (*agency cost*) yang harus di tanggung perusahaan besar jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil sehingga untuk menurunkan biaya tersebut, perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Selain itu, dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, perusahaan besar mencoba untuk mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu akuntabilitas dan transparansi (Bambang Purnomosidhi, 2006:7). Menurut penelitian Akin Septiawan Permono (2011), variabel ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.5. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan akan informasi perusahaan (Akin Septiawan Pernomo, 2011: 9). Semakin lama umur perusahaan semakin terlihat pula eksistensi perusahaan (*going concern*), sehingga semakin luas pula pengungkapan yang dilakukan yang berkaitan untuk menciptakan keyakinan pada pihak luar dalam kualitas perusahaannya (Ahmadi Nugroho, 2012:4). Menurut penelitian Akin Septiawan Pernomo (2011), umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela modal intelektual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.6. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah (Fitri Romadhon dan Isnalita, 2014:5). Dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin meningkat, perusahaan pasti akan melakukan perluasan pengungkapan agar investor dapat melihat kinerja keuangan yang dapat menjadi daya jual perusahaan tersebut. Indikator ROA dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset serta merupakan proksi untuk pengukuran profitabilitas (Chen *et al.*, 2005). Semakin baik perusahaan dalam mengelola aset, maka semakin baik perusahaan dalam mengelola modal intelektual. Hal ini dikarenakan modal intelektual diakui sebagai aset perusahaan yang mampu menghasilkan keunggulan kompetitif. Menurut penelitian Heni Octavianti dan Wahidahwati (2014), profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

2.4.7. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

Terdapat potensi transfer kekayaan dari *debt-holders* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi sehingga menimbulkan biaya keagenan yang tinggi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi juga akan mendapat perhatian dari kreditur untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian hutang. Untuk mengurangi biaya keagenan serta asimetri informasi antara manajer dengan kreditur maka perusahaan akan melakukan pengungkapan secara lebih luas termasuk pengungkapan modal intelektual. Menurut Bambang Purnomosidhi (2006), *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₇ : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL